



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI JAENUDIN
2. Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN DAN TRESURI
3. NHK : 692772

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.190.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/190 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 1755 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 1.140.750.000
3. Tanah Seluas 3126 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 9680 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 2719 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 1410 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 1878 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 586 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 634.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000



3. MOTOR, VESPA 125 S Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
280.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	96.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	131.458.371
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.053.458.371
III. HUTANG	Rp.	1.320.684.784
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.732.773.587

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.